



# Konsensus Tak Cukup Lindungi Buruh Migran

**JAKARTA, KOMPAS** — Perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tidak cukup hanya mengandalkan konsensus. Lebih dari itu, diperlukan adanya mekanisme serta upaya preventif, pengawasan, dan monitoring untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan yang menimpa pekerja migran.

Demikian salah satu poin yang mengemuka dalam kegiatan Konsultasi Regional Civil Society Organization untuk Implementasi Konsensus ASEAN mengenai Perlindungan dan Pemajuan Pekerja Migran, di Jakarta, Selasa (20/2).

Konsensus perlindungan bagi pekerja migran di seluruh ASE-

AN yang disepakati pada November 2017 telah menjadi instrumen bagi negara-negara ASEAN untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran, baik oleh negara pengirim maupun penerima.

Meski demikian, kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri masih terjadi. Terakhir, muncul kasus meninggalnya Adelina Sau (23) di Malaysia pada Minggu (11/2) karena perlakuan tidak manusiawi majikannya.

Direktur Eksekutif Human Right Working Group Muhammad Hafiz berpendapat, dengan konsensus tersebut, jaminan keamanan bagi tenaga kerja In-

donesia masih bersifat relatif. Lebih daripada konsensus, perlu ada upaya preventif, pengawasan, dan monitoring. Hafiz menambahkan, pemerintah dapat mempertimbangkan opsi moratorium pengiriman tenaga kerja ke luar negeri hingga negara penerima benar-benar serius menangani kasus kekerasan yang menimpa tenaga kerja asal Indonesia.

"(Moratorium) itu salah satu cara memberikan efek bagi pelaku dan negara untuk tidak mengulang," kata Hafiz.

Pendapat serupa disampaikan perwakilan Indonesia untuk ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children

(ACWC), Yuyum Fhahni. Menurut Yuyum, perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia baik yang legal maupun ilegal harus terus dilakukan atas dasar kemanusiaan.

Direktur Pengembangan Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Roostiawati mengatakan, usulan moratorium tenaga kerja harus dikaji lebih dalam. Roostiawati menyatakan, banyak hal mesti dipertimbangkan pemerintah sebelum memutuskan sebuah kebijakan. Meskipun demikian, opsi moratorium masih mungkin akan dilakukan. Keputusan itu bergantung pada hasil kajian yang tengah dilakukan Kemnaker. (DD10)